**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada tanggal 1 Oktober 1949 Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat China (RRC). Pemerintahan China dibawah kepemimpinan Mao Zedong yang berhaluan komunis memberikan angin baru bagi rakyat China, yang dimana semua hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi dikuasai negara. di tahun 1958 Mao Zedong meluncurkan program “Loncatan jauh ke depan” yang bertujuan membangkitkan ekonomi China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah. Namun ternyata program “Loncatan jauh ke depan” merupakan sebuah kegagalan ekonomi. Di antara konsekuensi ekonomi yang diakibatkan oleh program ini adalah kekurangan pangan (yang juga disebabkan oleh bencana angin), kekurangan bahan mentah untuk industri, berlebihannya produksi barang berkualitas rendah, rusaknya proyek-proyek industri Karena manajemen yang salah, serta kelelahan dan demoralisasi kaum petani, intelektual, dan kader partai maupun pemerintah di semua tingkatan. Dan akibat paling buruk dari gagalnya program Lompatan Jauh ke Depan ini, terjadi kemiskinan dan kelaparan massal yang luar biasa di seluruh Cina[[1]](#footnote-1) Di tahun 1966 Mao mengkampanyekan diadaannya Revolusi Kebudayaan yang bertujuan mengembalikan semangat revolusioner masyarakat China, namun dalam praktiknya revolusi kebudayaan malah membuat tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat China ambruk,Mao mengumpulkan sekelompok radikal termasuk istrinya Jiang Qing dan Menteri pertahanan Lin Biao untuk membantunya menyerang pimpinan partai pada saat itu dan menegaskan kembali hegemoninya. Mao menutup sekolah-sekolah negeri, menyerukan mobilisasi kaum muda untuk mengambil kepemimpinan partai untuk menghadapi jeratan-jeratan nilai-nilai borjuis dan kurangannya semangat revolusioner. Pada bulan-bulan berikutnya, gerakan tersebut meningkat dengan cepat saat para siswa membentuk kelompok paramiliter yang disebut Pertahanan Merah dan menyerang serta melecehkan kelompok manula dan intelektual China.[[2]](#footnote-2)

Disaat pembentukan ASEAN tahun 1967, China masih terlibat dalam kecamuk revolusi kebudayaan, dan itulah salah satu alasan ASEAN dibentuk untuk membuat keseimbangan kolektif untuk menghadapi rezim yang menginspirasikan kekacauan di beberapa Negara asia tenggara. China melihat bahwa pembentukan ASEAN hanyalah salah satu kepentingan Amerika Serikat dan Jepang semata, sehingga China melihatnya sebagai ancaman, baik dalam bidang keamanan maupun perdagangan. Tata kehidupan politik pasca Mao dicirikan oleh sejumlah perubahan mendasar. Pada Kongres Partai Nasional (KRN) ke-11 yang diadakan pada tanggal 12-18 Agustus 1977, Hua diresmikan sebagai ketua partai, sementara Ye Jianying, Den Xiaoping, Li Xiannian, dan Wang Dongxing dipercaya sebagai wakil ketua. Kongres mengumumkan berakhirnya Revolusi Kebudayaan secara resmi, dan dalam konteks inilah kemudia Den Xiaoping menjalankan politik Empat modernisasi dan reformasi ekonomi. China di masa Den Xiaoping kemudian membuat perubahan yang sangat signifikan yaitu dengan mengimplementasikan “kebijakan pintu terbuka”, ini dilakukan karena China menyadari bahwa kekuatan ekonomi mereka masih lemah dan masih sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara lain dalam proses mendorong pembangunan ekonomi negara. Para pemimpin China menentukan 4 tujuan dalam pembangunan ini yang disebut juga 4 modernisasi China yakni modernisasi militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, dan industri.[[3]](#footnote-3) Kebijakan ini tidak hanya membuka pintu terhadap dunia luar akan tetapi juga terhadap hubungan dengan negara-negara didunia termasuk ASEAN. Adapun perubahan kebijakan tersebut dengan menggunakan beberapa cara, yaitu *Open door policy, Good neighbor policy, The go global strategy.*[[4]](#footnote-4)

Ancaman komunis dari China merupakan salah satu faktor pendorong pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Rusaknya hubungan China-Indonesia paska kudeta 1965 dan pembubaran Partai Komunis Indonesia semakin menegaskan jalan bagi pembentukan organisasi formal non-komunis di Asia Tenggara. China sendiri memandang pembentukan ASEAN tidak lebih dari manisfestasi “imperialisme” Amerika Serikat dan sebagai bagian dari sistem aliansi yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari China dan negara sosialis lainnya.[[5]](#footnote-5)

Pada saat Uni Soviet maupun Amerika berusaha untuk bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam melawan pengaruh China, China pun tidak tinggal diam dan mencoba menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pintu terbuka ketika Washington mengeluarkan Doktrin Nixon dan menarik pasukannya dari Indocina yang tentunya menimbulkan permasalahan di kawasan tentang kemauan dan kapabilitas Amerika Serikat dalam mempertahankan Asia Tenggara dari komunisme. China menggunakan moment itu dengan menawarkan hubungan kerja sama pada negara-negara Asia Tenggara. Malaysia kemudian menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan China pada tahun 1974, diikuti Thailand dan Filipina pada tahun 1975. Sejak saat itu, China terus mengintensifkan usahanya untuk menjalin hubungan diplomatic dengan negara-negara di kawasan ini meskipun harus menemui berbagai macam isu yang menghadang. Apalagi, ketika China dianggap sebagai “ancaman”, ketika masing-masing negara ASEAN menerima kehadiran China dengan sikap yang berbeda-bedadan di saat yang bersamaan China pun terus berusaha konsisten menunjukkan wajahnya yang damai. [[6]](#footnote-6)

Hubungan ASEAN dan China mulai terjalin sejak tahun 1990-an, yang diawali dengan hadirnya Mentri Luar Negeri China pada sesi pembukaan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur 19 Juli 1991 yang menyampaikan ketertarikan China untuk menjalin kerja sama dengan ASEAN. Hingga akhirnya, pada AMM ke-29 di Jakarta Juli 1996, ASEAN menyetujui status mitra dialog penuh bagi China menggantikan statusnya semula sebagai mitra konsultatif yang telah disandang sejak tahun 1991. Pada Desember 1997, Presiden China Jiang Zemin dan seluruh pempimpin negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan informal pertamanya dalam kerangka ASEAN+1 dan mengeluarkan penyataan bersama untuk membentuk kemitraan berdasarkan prinsip bertetangga yang baik dan saling percaya menuju abad 21. Kemitraan ASEAN dan China diwarnai dengan pasang naik dan surut, catatan memuaskan ditemukan pada tingkat perdagangan dan investasi antara ASEAN dan China yang terus meningkat cepat, dan tertuang pada diajukannya proposal *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* meliputi ke-10 negara ASEAN ditambah China,jepang, dan korea selatan yang awal pembicaraannya dilakukan pada pertemuan ASEAN+3 di bulan November 2000.[[7]](#footnote-7) Dan pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, para kepala negara anggota ASEAN dan China telah mendatangai *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* dalam rangka pembentukan ACFTA. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para kepala Negara kedua pihak menandatangi *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Phom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.

Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tangga 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia, dan protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.[[8]](#footnote-8) Pada tahun 2008, posisi China masih di peringkat ketiga sebagai mitra dagang ASEAN. Posisi pertama diduduki jepang, akan tetapi ditahun 2010 posisi China melesat ke posisi pertama sebagai mitra dagang ASEAN. Namun ada permasalahan tentang ketimpangan perdagangan antara negara anggota ASEAN dan China, mengenai hal itu Menteri perdagangan China Chen Deming akan memberi fasilitas bagi eksportir ASEAN. ACFTA sendiri telah memotong tarif barang dari ASEAN ke China 0,1% dari posisi awal 9,8% dan kebijakan itu sudah diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN.[[9]](#footnote-9) China semakin melirik pasar ASEAN, tercatat pada tahun 2015 china merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dengan total perdagangan sebesar 364,4 miliar dollar AS atau setara dengan 15,2% dari total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2015.[[10]](#footnote-10)

Asean+3 merupakan sebuah forum resmi ditetapkan pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya penyataan bersama mengenai kerja sama Asia Timur pada *ASEAN Plus Three (APT) Summit* ketiga di Manila. Tiga aspek yang berkontribusi pada konsolidasi ASEAN+3, yaitu adanya tiga gelombang transformasi sosial ekonomi Asia Timur (liberalisasi/globalisasi ; Krisis Asia 1997-1998 ; mewabahnya SARS) yang mendorong ASEAN dan China untuk mengembangkan model sosial ekonomi Asia Timur; pragmatism China dan perubahan persepsi ASEAN mengenai ancaman China yang telah mengubah hubungan ASEAN-China: penegasan identitas Asia atau “*Asianess*” khususnya dengan berkembangnya “Soft Power” China dan sikap ASEAN yang bisa menerimanya. Peran ASEAN dan Cina dalam ASEAN+3 bila disarikan dari tulisan yang dipaparkan Eric Theo Chu Cheow adalah:

1. Memberi model pada perkembangan sosial ekonomi Asia Timur Terjadi pergeseran dalam model integrase ekonomi Asia Timur yang semula menggunakan“*flying geese model*” yang mengacu pada Jepang secara vertikal menuju pada “*bamboo capitalism*” atau “*parallel development*” dengan China sebagai pusatnya.
2. Dalam bidang diplomatik dan geopolitik dengan membangun fondasi bagi perkembangan ASEAN+3 Ini tak lepas dari meningkatnya soft power China di Asia Tenggara ketika China tidak lagi dipandang sebagai ancaman tetapi China dipandang sebagai sebuah peluang terutama dalam hal ekonomi bagi ASEAN Tiga faktor internal Cina yang turut mendukung yaitu pragmatism Cina ekonomi Cina yang memberi banyak kesempatan bagi negara negara ASEAN serta diplomasi ulung para pernimpin Cina Berkembangnya *soft power* China tentu semakin membawa pengaruh baik sosial maupun budaya di kawasan ASEAN. Regionalisasi ASEAN kemudian meluas menjadi ASEAN+3 dan selanjutnya bertransformasi ke arah *East Asia Summit* (EAS) menuju *East Asia Community* (EAC) Sejalan dengan itu *East Asia Vision Group* (EAVG) mengusulkan dibentuknya kawasan perdagangan bebas Asia Timur (EAFTA) yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara Asia Timur yang memuat kawasan perdagangan bebas bilateral dan subregional di kawasan ini di rnana sektor perdagangan dan investasi merupakan katalisator dalam proses menuju Komunitas Asia Timur yang ingin dibangun Pengaturan perdagangan bebas di kawasan Asia Timur ini akan mengambiI bentuk *hub and spoke* (sumbu dan jari-jari) seperti ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea Selatan.[[11]](#footnote-11)

Di bidang keamanan, ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum multilateral untuk kerja sama dan dialog keamanan di kawasan Asia Pasifik dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak utamanya. Dikukuhkan pada 25 Juli 1994 di Bangkok dengan tiga fase proses kerja sama dan dialog keamanan (*ARF Concept Paper’s Three Stages)* yang diadopsi sejak *ARF Ministerial Meeting* kedua tahun 1995. Ketiga proses kerja sama itu meliputi peningkatan pembentukan kepercayaan, pengembangan diplomasi preventif, dan elaborasi pendekatan terhadap konflik. Sejak 1994 itu pula, China telah menjadi mitra dialog penuh ARF. Disamping itu China khawatir dengan kerangka keamanan multilateral di kawasan, kekhawatiran China terutama dengan kecenderungan kerangka multirateral ini akan memfasilitasi kerja sama internasional melawan kepentingan China seperti internasionalisasi isu Taiwan maupun Spratly, *market*-isasi negara-negara komunis Asia, menekan militer China agar melakukan transparansi lebih jauh atau bahkan menahan China sebagai kekuatan militer. Secara prinsip China menerima kerangka multilateral namun tidak menutup kemungkinan bagi kerangka bilateral, dikarenakan kerangka multilateral hanya akan membuat masalah menjadi semakin sulit. Sehingga, Qian Qichen dalam pertemuan ARF tahun 1994 di Bangkok mengajukan “peningkatan dialog keamanan multilateral dan bilateral”. Sehingga muncul pertanyaan apakah sungguh perkembangan hubungan ini sebagai buah kesadaran bahwa hubungan China-ASEAN merupakan pilar penting dalam strategi keamanan dan kebijakan luar negeri China paska-perang dingin atau sebagai jalan bagi China untuk mengkukuhkan kepemimpinannya di Asia Pasifik, di samping keinginannya untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat atas keamanan di Asia Pasifik.[[12]](#footnote-12)

Bagi China, Asia Tenggara semakin memegang peranan penting untuk beberapa alasan: 1) integrase ekonomi yang semakin dekat, seperti dalam ASEAN+3 dan ASEAN+1; 2) Zona ekonomi China yang sangat maju berada di sepanjangan pantai yang menghadap Asia Tenggara; 3) lebih dari separuh jalur laut bagi perdagangan luar negeri China dihubungkan dengan kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, hubungan di antara keduanya masih terkendala sejumlah masalah, yaitu: pengaruh geopolitik tradisional menjadikan ASEAN masih diliputi kekhawatiran bahwa modernisasi China saat ini akan menjadi ancaman baik dalam bidang ekonomi, politik dan militer; perselisihan territorial dengan China atas kepulauan Spratly yang terus menjadi masalah; hambatan ekonomi, terutama disebabkan hubungan dagang bilateral yang berkembang lamban, struktur barang ekspor yang relatif sama.[[13]](#footnote-13)

Maka dari hal itulah *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) lahir, yang dimana inisiatif pembentukan AIIB dimulai sejak Presiden Xi Jinping menyampaikan inisiatif tersebut pada pertemuan APEC Leaders bulan Oktober 2013 di Bali, Indonesia. Tujuan pembentukan AIIB sendiri adalah 1) untuk mendukung konektivitas, integrasi, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara Asia; 2) untuk memenuhi gap dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Pembangunan Multilateral lain. Mou pendirian AIIB telah ditandatangani pada tanggal 23-24 Oktober 2014 oleh 21 Negara yaitu kesembilan negara ASEAN (kecuali Indonesia), Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, dan RRT. Isi dari MoU terdiri dari tujuh bagian: 1) Mandat, 2) Operasional, 3) Modal dan Penyertaan, 4) Keanggotaan, 5) Tata Kelola, 6) Kantor Pusat, 7) Lain-Lain. Pada kesempatan tersebut, Indonesia tidak dapat ikut menandatangani dikarenakan masih dalam proses transisi pemerintahan baru. Namun demikian, Indonesia hadir dalam proses penandatanganan MoU dan bertindak sebagai potential founding member yang diberikan fleksibilitas waktu khusus oleh RRT. Penandatanganan MoU AIIB telah dilakukan pada tanggal 25 November 2014, bertempat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan bertindak sebagai wakil Pemerintah Indonesia yang akan menandatangani MoU Pendirian AIIB dengan dihadiri oleh Duta Besar RRT untuk Indonesia yang bertindak sebagai saksi penandatanganan MoU dan beberapa pejabat Kementerian Keuangan dan Kementrian Luar Negeri.[[14]](#footnote-14)

Dan langkah China tersebut diimplementasikan kedalam program *One Belt One Road*, yang dimana *One Belt One Road* merupakan konsep yang mencoba membangun zona integrase ekonomi euroasia. Program ini akan membangun jalur ekonomi kerjasama Tiongkok ke Eropa melalui Asia tengah dan beberapa negara ASEAN. Menurut data dari ADB, infrastruktur di Asia sampai dengan tahun 2020 membutuhkan dana sekitar 8 trilyun USD.[[15]](#footnote-15)

Pendekatan yang dilakukan China dalam konteks yang lebih luas, bukan sekedar kepentingan ekonomi. Membentuk aliansi dengan ASEAN memang merupakan pilihan kebijakan China untuk melaksanakan kepemimpinan dan pengaruh regional serta membangun *political trust* dengan negara tetangganya serta memperkuat keamanan regional dalam kepentingan China. Pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara ASEAN dan China. Sehingga hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi ASEAN, ASEAN dituntut untuk bisa menjaga perdamaian, stabilitas ekonomi dan politik serta kesejahteraan masyarakat negara anggotanya ditengah penetrasi Politik Luar Negeri China yang semkain lama semakin kuat. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat permasalahan ini melalui judul, “**Pengaruh Politik Luar Negeri China terhadap eksistensi ASEAN di Asia Pasifik** “.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Sejauhmana strategi kebijakan Politik Luar Negeri China menjadikan ASEAN sebagai kawasan strategis ekonomi politik?

b. Bagaimana respon ASEAN terhadap implementasi kebijakan Politik Luar Negeri China di kawasan Asia pasifik?

c. Sejauhmana mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN menghadapi implementasi kebijakan Politik Luar Negeri China?

1.**Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi diseputar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan, sedangkan kemampuan penulis baik dalam pencarian data dan ketersediaan waktu yang singkat, serta agar penelitian ini dapat lebih fokus dan mencapai target penelitian maka dari itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu kepentingan ekonomi politik negara-negara anggota ASEAN.

2.**Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam permasalahan yang berdasarkan identifikasi masalah, maka diperlukannya perumusan masalah, yaitu:

“Bagaimana eksistensi kelembagaan dalam mengakomodasi kepentingan ekonomi politik negara-negara anggota ASEAN terhadap implementasi strategi kebijakan Politik Luar Negeri China?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   * + 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

* + - * 1. Untuk mengetahui kebangkitan ekonomi China.
        2. Untuk mengetahui pengaruh dari Politik Luar Negeri China terhadap eksistensi ASEAN di kawasan Asia Pasifik.
        3. Untuk mengetahui respon ASEAN terhadap politik luar negeri China dalam menjaga stabilitas ekonomi politik di kawasan Asia pasifik dan Asia tenggara.
        4. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang di hadapi oleh ASEAN.

**2.Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi jurusan ilmu hubungan internasional, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang politik luar negeri khususnya politik luar negeri China.
2. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang bagaimana pengaruh Politik Luar Negeri China terhadap eksistensi ASEAN di Asia pasifik.
3. Bagi penulis, penelitian ini sangat menambah pengetahuan, wawasan, kemampuan analisis fenomena – fenomena internasional yang terjadi.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai terbentuknya Negara China dan Politik Luar Negerinya dalam proses China sebagai negara maju sertapula bagaimana ASEAN merespon hal tersebut.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

1.**Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah kerangka teoritis yang digunakan peneliti untuk menganalisa masalah penelitian, dengan demikian diperlukan teori – teori dan konsep – konsep yang mempunyai penjelasan lebih baik untuk menganalisis fenomena yang lebih luas dan memuaskan.

Setiap teori yang ada dalam hubungan internasional tentu dilandasi berbagai asumsi dasar yang berbeda – beda sehingga masing – masing teori tidak akan sama dan tidak selalu dapat diterapkan untuk menjelaskan ragam fenomena yang terjadi. Dengan demikian, tercipta banyak teori yang menyesuaikan dengan keadaan, sebab salah satu sifat dasar teori adalah kondisional dimana teori lahir dari suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Hubungan internasional menjadi sangat penting dewasa ini dikarenakan negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri dan tidak ketergantungan terhadap duni internasional, dalam hal ini K.J. Holstidalam bukunya *politik Internasional: Kerangka untuk analisis*, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai:

**“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara meliputi dunia kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[16]](#footnote-16)**

Hubungan Internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan hubungan baik dilakukan oleh negara maupun non-negara. dimana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri dan Politik Internasional, Perbedaan Hubungan Internasional dengan konsep Politik Luar Negeri dan Politik Internasional adalah bahwa kedua konsep ini hanya mengkaji aktor negara saja.

**Carlton Clymer Rodee et al.** mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

**“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain … [yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”[[17]](#footnote-17)**

Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain.

Sedangkan kepentingan nasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, mendefinisikan bahwa:

**“Kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa . . . yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain.”[[18]](#footnote-18)**

Dalam kasus ini, PLN China dipengaruhi pemikiran Mao Zedong. Mao berambisi untuk membawa China menjadi kekuatan modern kelas satu di mata dunia. Diubahnya metode dan strategi pembangunan yang dijalankan, namun tanpa mengubah tahap-tahap pembangunan China. Untuk memenuhi ambisinya itu, pada bulan Mei 1958, Mao mengumumkan strategi pembangunannya yang baru. Strategi Mao kali ini adalah dengan lompatan besar ke depan atau *Great Leap Forward* atau dalam bahasa aslinya disebut *Da Yue Jin*.[[19]](#footnote-19) Lompatan besar ke depan merupakan sebuah program yang disusun oleh Partai Komunis China di RRC, yang berlangsung dari tahun 1958 hingga 1960 dengan tujuan untuk membangkitkan ekonomi China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan tenaga kerja murah. Kemudian setelah kematian Mao, orang yang berkuasa di China adalah Deng Xiaoping. Karena kedekatannya dengan militer dalam jangka waktu yang lama, dialah satu-satunya orang dalam puncak hirarki kekuasaan yang mampu mendapatkan penghormatan dan dukungan dari sebagian besar pejabat. Beberapa kebijakan China di masa Deng Xiaoping[[20]](#footnote-20) diantaranya:

1. Kebijakan Empat Modernisasi
2. Modernisasi Militer: Deng merekomendasikan tiga bentuk reformasi, yaitu: (1) memperbaiki struktur komando militer di bawah KUM; (2) modernisasi pelatihan perwira militer; dan (3) meningkatkan kemampuan perwira-perwira militer. Di samping itu, Deng merasa perlu untuk mengadakan mutasi atas para perwira yang dianggap `tidak pantas' menduduki jabatannya karena kurang pendidikan dan konsep-konsepnya yang telah usang.
3. Modernisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pada tahun 1985 di China terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Tujuan pembangunan iptek China adalah menyamai kemajuan negara-negara industri seperti Jepang dan AS pada abad ke-21. Ada tiga perubahan utama dalam reformasi iptek masa itu, yakni:

* *Pergesaran fokus penelitian dari ilmu murni ke terapan*. Penelitian iptek haruslah "berintegrasi" dengan produksi ekonomi. Beberapa pemimpin China berharap bahwa pada tahun 2000 China dapat mencapai kemajuan teknis setaraf dengan Barat dan Jepang. Untuk mencapai tujuan itu sejumlah reformasi diperkenalkan pada tahun 1985. "Jaringan Horisontal" dibangun antara lembaga riset dan industri serta antara perusahaan dan pemerintahan lokal. Lembaga riset sekarang bertanggung jawab menyebarkan hasil penelitian terapan untuk mengembangkan teknologi industri dan perusahaan.
* *Komersialisasi kemajuan teknologi*. Ratusan "pameran transaksi teknologi" diadakan sehingga lembaga penelitian dapat memamerkan dan menjual inovasi teknologinya kepada sektor industri. Transaksi-transaksi ini diadakan di kota-kota pusat industri seperti Shanghai, Wuhan, dan Tianjin. Reformasi ini memunculkan sistem kontrak antara lembaga penelitian dengan perusahaan. Sistem ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada lembaga penelitian dalam mengatur kegiatan mereka dan dapat memperkecil pengawasan pemerintah.
* *Efisiensi pemanfaatan keahlian para ilmuwan dan pakar teknologi*. Para intelektual makin terbebas dari campur tangan politik dan dapat menjalankan diskusi-diskusi akademis secara independen.

1. Modernisasi Pertanian: Sistem insentif dalam sektor pertanian mulai diperkenalkan pada tahun 1978 dan diberlakukan pada tahun 1980. Sistem ini adalah modifikasi dari "Tiga Kebebasan dan Satu Garansi" yang diperkenalkan Liu Shaoqi pada awal tahun 1960-an. Kebijakan Liu tersebut terdiri atas pasar bebas, pemilikan tanah pribadi, dan tanggung jawab petani dalam mengatur tanah pertanian mereka sendiri menurut kontrak penetapan kuota keluaran setiap rumah tangga.
2. Modernisasi Industri: Antara tahun 1953 hingga 1974 pertumbuhan rata-rata produksi industri di China adalah 11%. Walaupun pertumbuhan tersebut rata-rata tinggi, tetapi kualitas, variasi dan rancangan produk-produk industri itu sangat menyedihkan. Oleh karena itu, pada presentasinya tentang Rencana Lima Tahun ke-6, PM Zhao mengajukan pertumbuhan rata-rata yang lebih rendah dari produksi industri, namun dengan hasil-hasil ekonomi yang lebih baik. Inilah yang menjadi latar belakang reformasi industri di China.
3. *Open door policy*

Open door policy dikenal semenjak tahun 1980, kebijakan ini tidak hanya merubah pembangunan ekonomi politik china, tetapi juga arah dari politik internasional dan kekuasaan ekonomi.

Bagi para penduduk China daratan, kebijakan ini dipandang sebagai kesempatan untuk berubah, termasuk perbaikan kehidupan mereka sehari-hari Karena peningkatan ekonomi, pengamatan terhadap perubahan global dengan penggunaan internet yang lebih luas, pergi ke luar negeri untuk belajar dan perbaikan hubungan dengan negara lain. Untuk negara lain kebijakan ini juga dianggap sebagai kesempatan untuk berubah, termasuk mempelajari masyarakat China, untuk lebih mengerti raksasa asia, untuk beradaptasi dengan kebudayaan China, kebiasaan dan cara hidup, untuk bermitra di sistem internasional, menerima China di institusi regional maupun internasional, dan untuk menilai kekuatan dari raksasa Asia yang sedang berubah dan bangkit.

Kebijakan ini adalah kebijakan yang komprehensif, yang mempunyai pengaruh di semua bagian, entah itu domestik atau hubungan internasional, baik dari segi politik, ekonomi bahkan sosial. Kebijakan ini merupakan inisiatif politik yang merubah hubungan luar negeri China dengan banyak negara di dunia ini. Sebelum adanya kebijakan ini perusahaan China tertutup dari perekonomian dunia. Investasi asing dilarang, hanya perusahaan milik pemerintah yang bias/boleh berhubungan dengan pebisnis asing, dan hanya pemerintah yang melakukan ekspor impor. Pengaruh dari kebijakan open door terlihat pada perdagangan China dan mengalirnya investasi asing dan pinjaman yang meningkat. Antara tahun 1978-1990 ekspor China tumbuh hampir 18% per tahun dari $8.8 milyar, mencapai $60.9 milyar, begitu juga dengan importnya dari $9.8 milyar menjadi $52.3 milyar.[[21]](#footnote-21)

Sehingga jika dilihat dari langkah-langkah yang tempuh oleh China, China merupakan langkah yang dapat dijelaskan oleh Robert Gilpin. Ekonomi politik internasional menurut Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of Internasional Relations*, secara umum adalah

” **Studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional**” (Gilpin, 1987:3).

Rober Gilpin mendefinisikan konsep ekonomi-politik sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). Hal tersebut menyiratkan adanya hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Dengan begitu menunjukan bahwa negara sebagai otoritas tertingi dalam politik dan pasar sebagai jantung dalam hal ekonomi saling berinteraksi dalam proses penempatan kekuasaan dan kekayaan dalam lingkup hubungan internasional. Pasar modern menggunakan dan didasarkan pada aturan-aturan politik karena apabila tidak, pasar tersebut akan menjadi pasar gelap (black market). Pasar dapat berjalan karena ada regulasi dan aturan politik sebagai kerangka kerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa barang siapa yang kaya dia yang akan berkuasa. Kata-kata ini pada kenyataannya memang berlaku dalam interaksi antara negara-negara di dunia secara global. Maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ’power’ dapat diraih melalui jalur ekonomi.[[22]](#footnote-22)

Berbeda dengan disiplin Hubungan Internasional yang memasukkan baik aktor negara maupun non-negara ke dalam kajian, didalam Politik Luar Negeri hanya mengkaji aktor negara. Namun, Politik Luar Negeri hanya menganalisa hal-hal yang ditetapkan suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Negara tersebut tidak ingin masuk kedalam lingkup lingkungan internasional atas reaksi dari Politik Luar Negerinya.

Reaksi tersebut meliputi interaksi antar negara di luar, sebagai contoh, dalam menanggapi politik luar negeri China yang dengan sepihak mengakui perairan Laut China Selatan meliputi kepulauan Spratly dan Paracel serta sebagian Natuna berdasarkan hukum *nine dash line* kedalam wilayahnya. Bagaimana reaksi Negara-negara yang lain khususnya Negara-negara yang ada disekitar LCS, apakah mereka satu sama lain saling mendukung, netral, atau bahkan cenderung menentang China.

Masalah reaksi yang dimunculkan oleh lingkungan luar tersebut dibahas dalam Politik Internasional. KJ.Holsti mendefinisikan Politik Internasional sebagai: **“…interaksi antara dua negara atau lebih … (yang terdiri atas) pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut…”**

Sehingga Politik Internasional merupakan bidang yang secara khusus membahas prinsip ‘aksi-reaksi’, berbeda dengan Politik Luar Negeri yang hanya membahas bagaimana sebuah negara membuat kebijakan atas dasar analisis kondisi internasional saja tanpa ingin masuk lebih dalam lagi guna membahas reaksi terhadap Politik Luar Negeri yang telah diberlakukan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, studi hubungan internasional memiliki banyak perspektif yang kerap digunakan dalam mempelajari itu sendiri. Satu dari yang terbesar merupakan teori Neoliberalisme. Pemikiran neoliberalisme lahir oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, yang berangkat dari pahal liberalism, yang dimana :

**Neoliberalisme menyetujui prinsip pahal liberal yang menekankan peran institusi internasional tanpa mengaburkan peran dari kekuatan negara.(Keohane 1989:11).**

Menurut paham neoliberalisme, globalisasi memudahkan negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional, sehingga terjadi peningkatan interdependensi antar-negara. hal ini akan menciptakan kerjasama yang anarki antar-aktor dalam sistem internasional.[[23]](#footnote-23)

Teori ketergantungan (*Dependency)* popular pada tahun 1960-an dan berkembang sebagai suatu kritik terhadap Teori Modernisasi Liberal. Modernisasi ditandai dengan perubahan secara ekonomi, teknologi, industri, sosial, budaya dan politik. Dikaitkan dengan pembangunan dan industrialisasi kapitalis, penemuan teknologi, konsumerisme, ekonomi pasar dan pertumbuhan populasi. Kritik terhadap teori ini mengatakan bahwa modernisasi belum berjalan bahkan pada masyarakat yang telah menanamkan nilai-nilainya. Kemudian modernisasi akan menganggap budaya, tradisi dan sejarah beberapa ‘negara kurang berkembang’ sebagai sesuatu yang tidak berarti. Seperti dijelaskan oleh Theotonia Dos Santos dalam Struktur ketergantungan, Dos Santos mendefinisikan ketergantungan sebagai:

**[Dependency is]…an historical condition which shapes a certain structure of the world economy such that it favors some countries to the detriment of others and limits the development possibilities of the subordinate economics…a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development and expansion of another economy, to which their own is subjected. (Theotonio Dos Santos, “The Structure of Dependence,” in K.T. Fann and Donald C. Hodges, eds., Readings in U.S. Imperialism. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226).**[[24]](#footnote-24)

Makna yang dapat ditangkap dari penyataan Dos Santos ialah bahwa ketergantungan ekonomi negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh tidak terintegrasinya ke dalam tata ekonomi kapitalisme, tetapi monopoli modal asing, pembiayaan pembangunan dengan modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional mampu mencapai posisi menguntungkan dalam interaksinya dengan negara maju, yang pada gilirannya menjadikan negara dunia ketiga mereproduksi keterbelakangan , kesengsaraan, dan marginalisasi sosial di dalam batas kewilayahannya. Dalam hal ini tanpa negara-negara kaya, negara-negara miskin dianggap tidak mampu untuk meingkatkan taraf kehidupannya. Karena negara-negara kaya secara aktif terus melakukan dominasi terhadap negara miskin yang dilakukan di berbagai sektor seperti ekonomi, media, politik, perbankan dan keuangan, Pendidikan dan semua aspek pembangunan sumber manusia. Tedapat tiga ciri persamaan atas definisi yang disepakati oleh para ahli teori ketergantungan.

Pertama, ketergantungan membentuk sistem internasional yang terdiri dari dua negara yang digambarkan sebagai dominan/tergantung, pusat/periferi atau metropolitan/satelit. Negara-negara dominan adalah negara maju yang mempunyai kemajuan industri dan tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sedangkan negara-negara tergantung adalah Amerika Latin, Asia dan Afrika yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada ekspor satu jenis komoditi untuk memperoleh devisa (*foreign exchange*). Kedua, memiliki asumsi yang sama bahwa adanya kekuatan (dorongan) dari luar merupakan satu-satunya aktivtas ekonomi yang penting di dalam negara-negara yang bergantung. Kekuatan luar ini termasuklah Perusahaan Multi National (MNC’s) MNC, pasar komoditi internasional, bantuan luar negeri, komunikasi dan berbagai bentuk lainnya yang oleh negara-negara maju digunakan untuk kepentingan ekonomi mereka di luar negeri. Ketiga, pengertian ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antara negara yang mendominan dan yang bergantung adalah dinamis, karena interaksi antara dua negara bukan hanya untuk saling menguatkan, tetapi juga untuk meningkatkan pola/corak yang tidak merata dalam pembagian ekonomi.[[25]](#footnote-25)

**Asumsi**:

* 1. China akan mendominasi kawasan Asia Pasifik.
  2. ASEAN menjadi pangsa pasar produk-produk China yang bersifat masif.
  3. ASEAN akan sulit untuk mempertahankan independensinya dan sentralitasnya.
  4. Negara anggota ASEAN akan ketergantungan oleh China.

2.**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Yang dimana hipotesis sendiri memiliki pengertian sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka dari itu penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Kebijakan liberalisasi ekonomi China dalam produk-produk industri barang dan jasa yang bersifat masif merupakan tantangan sekaligus peluang dalam memelihara perdamaian dan stabilitas serta kesejahteraan bagi eksistensi ASEAN di kawasan Asia pasifik “

3. Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator.

**Tabel 1.1 Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam  Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel bebas:  Tantangan dan Peluang produk-produk industri China  Variable Terikat:  Eksistensi ASEAN di kawasan Asia Pasifik. | 1. Liberalisasi ekonomi politik China 2. Produk – produk industri negara China. 3. Stabilitas politik dan keamanan.   2.Perdamaian.  3.Kesejahteraan | 1. Masuknya China ke WTO   http://ekonomi.kompas.com/read/2011/11/11/16114165/masuk.wto.china.perkasa  https://www.wto.org/english/thewto\_e/countries\_e/china\_e.htm   1. Masuknya China ke APEC   http://www.geocities.ws/irsjournal/APEC.html  http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx   1. TPT, alas kaki, elektronik, makanan dan minuman.   http://www.ayomaju.info/mengapa-hampir-semua-produk-made-in-china/  http://ekonomi.kompas.com/read/2014/03/20/1203410/China.dan.Vietnam.Penyerang.Terbesar.Industri.Makanan.dan.Minuman  http://www.beritasatu.com/gadget/417898-3-ponsel-tiongkok-kuasai-21-pasar-asean.html   1. Peluang investasi   http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/18/113000126/china-bidik-peluang-besar-infrastruktur-di-asia-tenggara.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3533522/pemerintah-incar-investasi-us-20-miliar-pasca-ktt-jalur-sutera.   1. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN.   http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx   1. ASEAN Regional Forum   http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx   1. ASEAN VISION 2025.   http://www.kemlu.go.id/Buku/ASEAN%202025%20Melangkah%20Maju%20Bersama.pdf   1. Non Intervensi   https://www.seniberpikir.com/asean-dan-perdamaian-kawasan/   1. MEA.   http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx |

1. **Skema kerangka Teoritis**

**Gambar 1.1**

**WTO**

**APEC**

**LIBERALISASI**

**EKONOMI POLITIK**

**CHINA**

**ASEAN**

1. **Metode Penilitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Dengan judul yang diambil oleh penulis mengenai Pengaruh Politik Luar Negeri China Implikasinya Bagi Eksistensi ASEAN di Asia Pasifik, maka penulis menggunakan tingkat analisis korelasionis, yang dimana unit eksplanasinya pada tingkatan yang sama.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode histori analisis:

* 1. Metode deskripsi analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematik dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab-akibat dan penyusunan data. Di dalam metode ini dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam hubungan internasional termasuk dalam hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu, metode ini juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta pula mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang telah dipecahkan. Dalam penelitian ini, menggambarkan dan menganalisis pengaruh politik luar negeri China implikasinya bagi eksistensi ASEAN di Asia Pasifik.
  2. Metode Historis Analisis adalah metode yang digunakan dalam menganalisa kajian di masa lampau secara generalisasi di dalam memahami situasi sekarang untuk lebih memungkinkan perkembangannya di masa mendatang dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mengsistensika bukti-bukti yang kuat serta berguna dalam memahami perkembangannya di masa sekarang dan di masa mendatang berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta pula dalam pembahasan laporan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik itu yang bersifat teori maupun empiris, data yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, dan sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal,surat kabar, laporan-laporan serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang tengah dibasah serta pula pemanfaatan internet untuk mendapatkan data tertulis yang didokumentasikan.

1. **Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
   1. **Perpustakaan Universitas Pasundan**

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat.

* 1. **Perpustakaan Umum Daerah**

Jl. kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat.

1. **Lama Penelitian**

Penelitian diprogramkan 6 bulan, di mulai bulan April – September 2017. Adapun tahapannya yang leibh rinci dapat dilihat dalam table 1.2, pada halaman berikutnya.

**Tabel 1.2 : Lama Penelitian**

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI CHINA**

Bab ini menguraikan tentang perkembangan politik luar negeri China yang digunakan, sistem politik dan struktur pemerintahan China. Serta langkah masuknya China ke dalam keanggotaan APEC dan WTO yang merupakan komitmen dalam meliberalisasi perekonomian negaranya.

**BAB III EKSISTENSI ASEAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

Bab ini menguraikan tentang sejarah dari pembentukan ASEAN hingga perkembangannya dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Serta mitra wicara ASEAN hingga program MEA yang pada saat ini telah berjalan.

**BAB IV ARTI STRATEGIS EKSISTENSI ASEAN KOLERASINYA DENGAN LIBERALISASI EKONOMI POLITIK CHINA DI ASIA PASIFIK**

Dalam bab ini akan dibahas bagaimana perekonomian China bangkit serta upayanya dalam mendominasi kawasan Asia Pasifik dan bagaimana respon ASEAN menanggapi langkah China tersebut sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi politik, perdamaian serta mengakomodir kepentingan negara-negara anggota untuk kesejahteraan masyarakatnya.

1. <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30324/1e1200d79ef5775b20f98d7ed9188eda> di akses pada 5 April 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.hariansejarah.id/2017/04/revolusi-kebudayaan-di-china.html> diakses pada 6 April 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a3714821014 diakses pada 10 April 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. S.D. Muni,” China strategic Engagement with The new ASEAN”, hlm.16 [↑](#footnote-ref-4)
5. Denny Roy, *China’s Foreign Relations*, MACMILLAN PRESS LTD, London,1998, hlm. 175. [↑](#footnote-ref-5)
6. Saw Swee-Hock, Sheng Lijun,Chin Kin Wah (2005) dalam Lidya Chirstin Sinaga, Realitas Dan Prospek Hubungan ASEAN-China, Jurnal Penelitian Politik : Demokrasi Mati Suri (2007), hlm.97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (2005) dalam Lidya Chirstin Sinaga, Realitas Dan Prospek Hubungan ASEAN-China, Jurnal Penelitian Politik: Demokrasi Mati Suri (2007), hlm.98 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf> diakses pada 11 April 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/08/13/03273846/asean-china.menguat> diakses pada 11 April 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/08/134500326/china.adalah.mitra.dagang.terbesar.bagi.asean> diakses pada 11 April 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (2005) dalam Lidya Chirstin Sinaga, Realitas Dan Prospek Hubungan ASEAN-China, Jurnal Penelitian Politik: Demokrasi Mati Suri (2007), hlm.101 [↑](#footnote-ref-11)
12. Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (2005) dalam Lidya Chirstin Sinaga, Realitas Dan Prospek Hubungan ASEAN-China, Jurnal Penelitian Politik: Demokrasi Mati Suri (2007), hlm.98-99 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., hlm.100 [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://www.mof.go.id/SP/penandatanganan-mou-asian-infrastructure-investment-bank-aiib> diakses pada 14 April 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://www.kompasiana.com/swando/integrasi-ekonomi-asia-one-belt-one-road_555479b473977328149055df> diakses pada 17 April 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Penerjemah Wawan Juwanda, Bandung: Binacipta, 1992, hlm 26 [↑](#footnote-ref-16)
17. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rajawali, 2002) [↑](#footnote-ref-17)
18. K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Penerjemah Wawan Juwanda, Bandung: Binacipta, 1992, hlm 168. [↑](#footnote-ref-18)
19. “GERAKAN LOMPATAN BESAR KE DEPAN (GREAT LEAP FORWARD) (DA YUE JIN)”, [www.porosilmu.com](http://www.porosilmu.com), diakses dari [http://www.porosilmu.com/2015/01/revolusi-China-masa-mao-ze-dong.html](http://www.porosilmu.com/2015/01/revolusi-cina-masa-mao-ze-dong.html), pada tanggal 26 April 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cina di Masa Deng Xiaoping.pdf, di download dari elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a371482101, pada tanggal 20 April 2017. [↑](#footnote-ref-20)
21. S.D. Muni,”China strategic Engagement with The new ASEAN”, hlm.16 [↑](#footnote-ref-21)
22. Robert Gilpin, “The Dynamics of International Political Economy” dalam The Political Economy of International Relations . (Princeton: Princeton University Press,1992) hlm. 65-117 [↑](#footnote-ref-22)
23. http://sartika-t--fisip10.web.unair.ac.id/artikel\_detail-59668-Teori%20Hubungan%20Internasional-Liberalisme%20dan%20Neoliberalisme.html diakses pada 25 April 2017. [↑](#footnote-ref-23)
24. http://www.infokers.net/2015/09/teori-ketergantungan-dependency-theory.html diakses pada 25 April 2017. [↑](#footnote-ref-24)
25. http://www.infokers.net/2015/09/teori-ketergantungan-dependency-theory.html diakses pada 26 April 2017. [↑](#footnote-ref-25)